

# **TESIS**

## **ANALISIS PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

*Analysis Of The Development Of The Tourism Sector In Increasing Regional  
Genuine Revenue (PAD) In Toraja Utara District*

**RINIATY LIKU BULAWAN**

**A042211006**



**KEPADA**

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

# **TESIS**

## **ANALISIS PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

*Analysis Of The Development Of The Tourism Sector In Increasing Regional  
Genuine Revenue (PAD) In Toraja Utara District*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister  
Disusun dan diajukan oleh

**RINIATY LIKU BULAWAN**

**A042211006**



**KEPADA**

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## TESIS

### ANALISIS PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN TORAJA UTARA

*Analysis Of The Development Of The Tourism Sector In Increasing Regional  
Genuine Revenue (PAD) In Toraja Utara District*

disusun dan diajukan oleh

**RINIATY LIKU BULAWAN**  
**A042211006**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 27 Januari 2023

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Prof. Dr. Musran Munizu, SE., M.Si., CIPM.  
NIP. 197509092000121001


  
Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si.  
NIP. 196602201994122001

Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah,

  
Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA  
NIP. 196704141994121001



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si.  
NIP. 196402051988101001

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Riniaty Liku Bulawan**

NIM : **A042211006**

Program Studi : **Magister Keuangan Daerah. S2**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul : **Analisis Pengembangan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara**).

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 Februari 2023

Yang menyatakan,



*Riniaty*

**Riniaty Liku Bulawan**

## **PRAKATA**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perkenaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Analisis Pengembangan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara”. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayahanda **Stephanus Lobo’ Sandalinggi** dan Ibunda **Maria Tangronno’** yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis. Kasih sayang yang tak terhingga, cucuran keringat dan air mata, serta doa dan pengorbanan yang tiada hentinya. Ayah dan Ibu sebagai motivator buat penulis sehingga bisa sampai pada titik ini. Hingga kapan pun penulis tidak akan mampu membalasnya. Maaf karena seringnya menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan Ayah dan Ibu. Semoga cinta dan kasih sayang-Nya selalu memberi kesehatan serta kebahagiaan bagi Ayah dan Ibu, berbahagialah penulis memiliki orangtua seperti kalian.

Kepada suami tercinta **Ristam Matandung**, yang selalu setia mendampingi dan memberi motivasi dalam menyelesaikan program magister ini. Yang dengan penuh kesabaran berjuang bersama dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, membesarkan dan mendidik kedua putri kami **Kinaya Karin Matandung** dan **Kirani Kania Matandung** dengan penuh kasih sayang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa terus mengaruniakan kesabaran, kesehatan dan kebahagiaan dan kiranya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk kedua anak tersayang **Kinaya Karin Matandung** dan **Kirani Kania Matandung** yang adalah sumber semangat untuk terus berjuang dalam kehidupan ini yang adalah alasan untuk terus semangat dan berjuang, terima kasih anaku sayang untuk selalu memberi warna yang cerah dalam kehidupan keluarga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa terus mengaruniakan kesehatan, damai sejahtera

dan sukacita berlimpah untukmu dana memberkatimu dalam menggapai cita-cita. Sukses dalam pendidikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA**, selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. **Prof. Dr. Musran Munizu, SE., M.Si.,CIPM** dan **Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si**, selaku pembimbing dan tim penasihat yang telah memberikan perhatian, dukungan, saran, dan meluangkan waktu untuk berdiskusi selama penyusunan tesis;
5. **Prof. Dr. Mediaty, SE., M.Si., CA**, **Prof. Dr. Maat Pono, SE., M.Si** dan **Dr. Sabir, SE., M.Si**, selaku penguji yang juga sangat berperan besar dalam memberikan masukan terhadap perbaikan dan penyempurnaan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;
7. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
8. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara khususnya Badan Keuangan dan Aset

Daerah, Bapenda dan Dinas Pariwisata, DPRD Kabupaten Toraja Utara, UMKM (pelaku hotel dan restoran), Perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Toraya (AMAN Toraya) yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti di wilayah kerjanya.

9. Saudara Kandung Penulis, **Elsih Parung Limbong, Sanda Riku Masakke, Samida Sandalinggi, Marudindin Lombe' Lobo, Kamase Bura Lobo', Almiska Lobo' Sandalinggi'** dan **Windu Sari Asih Lobo Sandalinggi**, yang tak pernah lelah memberikan semangat untuk terus berjuang, terimakasih kakak dan adik.
10. Seluruh Keluarga Besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih karena telah hadir dalam kehidupan penulis.
11. Teman, saudara seperjuangan Kelas MKD 2021, **Bapak H. Usman, Bapak Arif sebagai ketua kelas, Bapak Iqbal, Adek Christin dan Adek Airin** atas segala bentuk kerjasama, kekompakan, serta motivasi dalam proses perkuliahan sampai selesai masa studi. Senag sekali menjadi satu angkatan dengan kalian dan menjadi keluarga dan sahabat yang sangat baik;
12. Teman teman yang telah membantu dan memberikan semangat dan dengan sabar untuk selalu mengingatkan agar bisa menyelesaikan studi ini **Bactiar Herman, Melvin, Jemi, Serlin, Sri, Leolasta** Terima kasih guys.
13. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun spiritual selama penyusunan tesis ini.

Sekali lagi, penulis menyadari akan ketidaksempurnaan tesis ini karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penyusunan karya ilmiah selanjutnya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat-Nya kepada kita semua. Aamiin....

**Makassar, Januari 2023**

**Riniaty Liku Bulawan**

## ABSTRAK

RINIATY LIKU BULAWAN. *Analisis pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara* (dibimbing oleh Musran Munizu dan Retno Fitrianti).

Kabupaten Toraja Utara memiliki kondisi geografis alam yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang, negeri di atas awan yang menjadi andalan sekarang, dan lain sebagainya. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan potensi wisata di Kabupaten Toraja Utara perlu untuk dilakukan. Hal ini berguna untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) besarnya potensi pajak sangatlah jauh berbeda dengan realisasi pajak hotel dan restoran pada tahun 2016 – 2020. Hal ini menunjukkan banyak potensi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Toraja Utara belum digali; 2) faktor-faktor pendukung pengembangan yang baik bagi suatu objek wisata alam. Hal-hal yang dapat menentukan kelayakan teknis dalam pengembangan suatu objek wisata alam terdiri atas faktor internal seperti (a) daya tarik objek, (b) pengelolaan, perawatan dan pelayanan, dan (c) tersedianya air bersih, sedangkan faktor eksternal meliputi (a) potensi pasar, (b) kadar hubungan, dan (c) kondisi lingkungan, kondisi alam, akomodasi, serta prasarana; 3) terdapat 10 strategi berdasarkan analisis matriks internal - eksternal dan matriks SWOT, yaitu (1) perluasan akses dan peningkatan kualitas pariwisata dan infrastruktur, (2) menggali potensi wisata yang masih belum dimanfaatkan, (3) peningkatan kualitas SDM yang dapat meningkatkan dan menguatkan sistem manajemen, (4) strategi pengembangan kebersihan objek wisata, (5) pemanfaatan objek wisata yang belum digali potensinya yang dapat meningkatkan kesempatan kerja, (6) peningkatan kapasitas sumber daya, (7) peningkatan kualitas SDM, (8) peningkatan infrastruktur sehingga dapat menarik investor, (9) peningkatan kualitas SDM untuk menjaga kualitas objek wisata, dan (10) objek wisata berbasis alam harus sepenuhnya dikelola dengan baik.

Kata kunci: pengembangan potensi wisata, objek wisata alam, pajak hotel dan restoran





## ABSTRACT

RINIATY LIKU BULAWAN. *Analysis of The Tourism Sector Development in Increasing Regional Revenue (PAD) in North Toraja Regency* (Supervised by Musran Munizu and Retno Fitrianti).

North Toraja Regency has beautiful natural geographical conditions. Therefore, it is necessary to develop tourism potential in North Toraja Regency, to improve people's welfare and open up job opportunity as an effort to improve the regional economy and improve people's welfare in North Toraja Regency. This research used descriptive qualitative approach. The results of this study are 1) The amount of tax potential is very much different from the realization of hotel and restaurant taxes in 2016-2020. This shows that there are many hotels and restaurant tax potential in North Toraja Regency that has not been explored, 2) Factors that support good development of a natural tourism object will be able to determine the technical feasibility in developing a natural tourism object consisting of internal factors such as the attractiveness of the object, management, maintenance and service, availability of clean water, while external factors include market potential, relationship level, environmental conditions, natural condition, accommodation, and infrastructure, 3) There are 10 Internal-External and SWOT Matrix analysis strategies: Expanding access and improving tourism and infrastructure quality, Exploring tourism potential that is still untapped, Improving human resources quality which can improve and strengthen management systems, Development strategies in the cleanliness of every tourism transportations, Utilization of tourist objects whose potential has not been explored which can increase employment opportunities, Increased resource capacity, Improved quality of human resources, Improved infrastructure to attract investors, Improved quality of human resources to maintain Tourist Attractions quality, and Nature-based tourism objects must be fully managed properly.

Keywords: tourism potential development, natural tourism object, hotel and restaurant taxes



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Teoritis	11
2.1.1 Teori Penerimaan Pemerintah	11
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah	14
2.1.3 Pariwisata	18
2.1.4 Pengembangan Sektor Pariwisata	21
2.1.5 Dampak Pengembangan Pariwisata	23
2.1.6 Pengelolaan Retribusi Pariwisata	23
2.2 Tinjauan Empiris	27
2.3 Kerangka Pikir	30

<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	33
3.1 Rancangan Penelitian.....	33
3.2 Lokasi Penelitian .....	33
3.3 Populasi dan Sampel.....	33
3.4 Data dan Sumber Data.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.6 Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil.....	37
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.1.2 Potensi pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Toraja Utara.....	39
4.2 Analisis SWOT.....	45
4.2.1 Faktor Internal.....	45
4.2.2 Faktor Eksternal.....	50
4.2.3 Hasil evaluasi faktor strategi internal dan eksternal .....	53
4.2.4 Matriks Analisis SWOT.....	55
4.3 Analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) .....	60
4.4 Pembahasan .....	63
4.4.1 Dasar Pertimbangan Perencanaan Pengembangan sektor Pariwisata Kabupaten Toraja Utara.....	63
4.4.2 Dasar Pertimbangan Pengembangan Berdasarkan Strategi Perluasan akses dan peningkatan kualitas pariwisata dan infrastruktur .....	64
4.4.3 Dasar Pertimbangan Pengembangan Berdasarkan Strategi Peningkatan kualitas SDM untuk menjaga kualitas Objek Wisata .....	65
4.4.4 Pemanfaatan objek wisata yang belum digali potensinya yang dapat meningkat kesempatan kerja .....	67
4.4.5 Peningkatan infrastruktur yang dapat menarik investor .....	68

BAB V: PENUTUP.....	70
5.1 Kesimpulan .....	70
5.2 Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	74
LAMPIRAN.....	78

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Kontribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Toraja Utara 2015-2021 .....	4
4.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015-2021 .....	40
4.2 Potensi, Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Toraja Utara 2015-2021 .....	41
4.3 Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Toraja Utara 2015-2021.....	42
4.4 Potensi Penerimaan pajak Restoran Kabupaten Toraja Utara 2015-2021 .....	43
4.5 Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Toraja Utara 2015-2021.....	44
4.6 Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) Pengembangan sector pariwisata di Kabupaten Toraja Utara.....	46
4.7 Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman) pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara .....	50
4.8 Matriks Internal Factor Evaluation (IFE).....	53
4.9 Matriks Internal Factor Evaluation (IFE).....	54
4.10 Matrik SWOT strategi pengembangan sector pariwisata di Kabupaten Toraja Utara .....	56
4.11 QSPM.....	60

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. Alur Kerangka Pikir Penelitian.....	4
2. Peta SWOT Internal dan Eksternal Penerimaan PAD Kabupaten Toraja Utara .....	40

## **LAMPIRAN**

Kuesioner Penelitian .....	78
Pengolahan Data Pajak Hotel dan Restoran .....	83
Pengolahan Data Pajak Restoran .....	86
Dokumentasi Penelitian .....	88
Jawaban Hasil Kuesioner .....	93

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, keanekaragaman hayati dan peninggalan sejarah atau budaya. Berlimpahnya sumber daya alam yang ada dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketika sumber daya tersebut dapat di kelola dengan baik sesuai dengan apa yang paling diminati masyarakat. Sehingga pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak akan menghabiskan waktu, ataupun materi akibat ketidakberhasilan dalam mengelola suatu sumber daya.

Pembangunan pariwisata pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata yang terwujud dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keanekaragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya dan peninggalan sejarah. Hal ini sejalan dengan UU No. 9 Tahun 1990 (Mengenai kepariwisataan dan peraturan Pelaksanaannya) disebutkan bahwa keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah serta seni budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal yang besar bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan.

Pemerintah membutuhkan pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan, dalam penyelenggaraan tugas maupun fungsi pemerintahan, serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu sumber dana dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan



pelayanan kepada masyarakat di daerah adalah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap pemerintah daerah bekerja keras dalam memperkuat perekonomian daerah, salah satunya meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah yaitu seluruh penerimaan daerah yang berasal dari retribusi, pajak, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Salah satu bentuk upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan cara mengelola potensi pariwisata yang dimiliki oleh suatu daerah. Oleh karena itu PAD sebaiknya ditingkatkan dengan cara meningkatkan pendapatan dari penerimaan pajak salah satunya adalah pajak yang berasal dari sektor pariwisata.

Penerimaan pajak daerah sektor pariwisata diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan. Salah satu bentuk pajak daerah tersebut adalah mengenai pajak sektor pariwisata yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Retribusi merupakan pungutan oleh daerah sebagai bentuk pembayaran pemberian izin dan layanan jasa tertentu yang telah disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah demi kepentingan masyarakat, atau badan menurut Undang – Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi. Retribusi adalah pembayaran wajib oleh penduduk untuk negara dengan adanya jasa tertentu yang telah diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan (Marihot, 2016). Berdasarkan pengertian dari Undang-Undang No. 34 tahun 2000 dan menurut (Marihot, 2016) diketahui bahwa retribusi adalah pembayaran yang wajib bagi penduduk yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan suatu badan.

Pariwisata merupakan sektor yang berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Selain sebagai sumber penghasil devisa yang cukup baik, pariwisata juga dianggap dapat mendongkrak kegiatan investasi. Untuk dapat mengembangkan suatu pariwisata pemerintah berupaya melakukan perbaikan, mengadakan berbagai fasilitas, serta melakukan kegiatan promosi agar lebih menarik minat wisatawan.

Kontribusi pajak dari sektor Pariwisata Pemerintah Kabupaten Toraja Utara diharapkan dapat terus meningkat, sehingga semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah maka akan menunjukkan kualitas Otonomi suatu Daerah tersebut akan terus meningkat. Penerimaan dari sektor pariwisata harus didukung pengaruh yang positif terhadap efektifitas penerimaan pendapatan di bidang atau sektor pariwisata, sehingga diharapkan pemerintah dapat menemukan strategi yang baik dalam meningkatkan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara.

Banyaknya obyek wisata menjadikan Kabupaten Toraja Utara memiliki potensi di sektor wisata yang cukup besar untuk dikembangkan. Pembangunan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara. Sektor pariwisata pada pengembangan sumber daya alam Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan, dalam 5 tahun mendatang, diharapkan lebih konstruktif bagi sumber pendapatan asli daerah. Rencana pembangunan sektor pariwisata saat ini bertumpu pada pengelola sumberdaya alam, seperti Gumuk Pasir Sumalu, Kete Kesu, Lolai, Pango-pango dan masih banyak lagi yang masih dikelola oleh warga setempat.

Potensi wisata di Kabupaten Toraja Utara sangat tinggi, tidak heran jika Toraja Utara jadi salah satu destinasi favorit di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2019 wisatawan domestik yang mengunjungi Kabupaten Toraja Utara berjumlah 363.065 orang. Tidak hanya wisatawan lokal keindahan Toraja Utara juga disoroti mancanegara dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Toraja Utara sebanyak 32.772 orang.

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menargetkan meningkatnya kunjungan wisata yang diwujudkan dalam penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Penerimaan pajak dari sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan sumber pembiayaan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toraja Utara. Selain itu, penerimaan pajak sektor pariwisata juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 1.1 Kontribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Toraja Utara  
2015-2021**

Tahun	Pajak Sektor Pariwisata (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi terhadap PAD
2015	797,619,200	33.808.406.730	2,4%
2016	1.126.105.200	34.896.515.041	3,1%
2017	1.575.010.000	44.134.854.82	3,4%
2018	3.510.245.600	41.975.878.751	8,3%
2019	3.170.305.000	51.882.966.518	6,6%
2020	1.757.413.500	43.853.643.361	4,01%
2021	854.637.000	45.992.928.912	1,86%

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara, 2022(Data diolah)*

Berdasarkan tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD selama 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun

2015 prosentase kontribusi Retribusi Pariwisata terhadap PAD sebesar 2,4% hal ini berarti bahwa sumbangan Retribusi Pariwisata terhadap PAD adalah sebesar 2,4 %. Pada tahun 2016 prosentase kontribusi Retribusi Pariwisata terhadap PAD sebesar 3,1 %. Pada tahun 2017 kontribusi Retribusi Pariwisata terhadap PAD sebesar 3,4% yang berarti bahwa sumbangan Retribusi Pariwisata terhadap PAD adalah sebesar 3,4%. Pada tahun 2018 sumbangan Retribusi Pariwisata terhadap PAD adalah yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir yaitu sebesar 8,3 %, hal ini dikarenakan para pelaku pariwisata bersama masyarakat yang telah bekerjasama mendorong peningkatan sektor pariwisata di Toraja Utara dan terjadi peningkatan wisatawan yang tentunya membawa dampak positif tidak hanya pada sektor pariwisata namun juga pada sektor ekonomi dan pembangunan Kabupaten Toraja Utara, namun dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara banyak tantangan yang membutuhkan perhatian dari semua pihak yang terkait. Salah satu kendala yang dihadapi khususnya dalam meningkatkan PAD sektor pariwisata yaitu masih terbatasnya fasilitas pendukung petugas dilapangan. Selain itu, beberapa objek wisata yang memiliki potensi belum terikat kerjasama dengan Pemda.

Pada tahun 2019 kontribusi Retribusi Pariwisata terhadap PAD sebesar 6,6%, Sedangkan dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan hal tersebut dikarena adanya kasus covid 19 yang mengakibatkan penurunan yang sangat drastic pada tahun 2020 sebesar 4,01 persen dan yang paling menurun yaitu tahun 2021 hanya sebesar 1,8 persen, namun masih banyaknya potensi wisata yang

belum terepose yang dapat meningkatkan sumbangan retribusi pariwisata di Toraja Utara.

Perkembangan sektor pariwisata pada saat ini telah menjadi sebuah industri. Hal ini dikarenakan aktivitas dari wisata tersebut secara ekonomi telah mendorong wisatawan untuk berkunjung di suatu objek wisata bukan hanya sekedar pada keindahan alam atau kekhasan budaya saja. Akan tetapi yang juga tidak kalah pentingnya yaitu pada kelengkapan sarana dan prasarana yang ada, produk cendera mata yang unik, perhotelan, makanan khas ataupun biro perjalanan.

Perkembangan industri pariwisata ini secara tidak langsung menimbulkan dampak atau manfaat multi ganda (multiplier effect) bagi Negara, Pemerintah daerah dan masyarakat. Selain mendatangkan devisa bagi Negara dan pendapatan daerah, pengembangan industri pariwisata ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, yaitu membuka dan memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama yang berada di sekitar daerah tujuan wisata. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan juga disebutkan bahwa salah satu tujuan dari kepariwisataan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu perlu diadakan studi mengenai penerimaan daerah dari subsektor pariwisata seberapa besar kontribusi atau peranan yang diberikan pariwisata yang diwujudkan melalui upaya pengembangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam mendukung atau meningkatkan PAD dengan cara merumuskan sebuah strategi yang baik, sehingga pemerintah

dapat melihat bagaimana kontribusi peningkatan jumlah tempat wisata terhadap PAD.

Fenomena adanya peningkatan pendapatan melalui sektor pariwisata harus bisa dikembangkan lagi dengan melakukan pembangunan infrastruktur pada objek-objek wisata karena di Toraja Utara masih memiliki banyak objek wisata alam yang belum terekspose yang dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata dan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, dan masih dikelola secara pribadi oleh individu saja. Seperti penelitian yang Mardianis (2018) mengenai Pembinaan Masyarakat yang Sadar Wisata. Strategi peningkatan kualitas SDM perlu dilakukan karena jika masyarakat tidak mampu membaca peluang-peluang yang ada di bidang pariwisata maka akan sangat sulit untuk mencapai tujuan pengembangan kawasan wisata yakni peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD.

Pengembangan sektor pariwisata harus berdasarkan dengan yang dilakukan dengan lebih fokus dengan tahap yang dikelola melalui penataan dan pengembangan berbagai objek wisata secara bertahap dan sistematis, dengan dilengkapi dengan dukungan segala fasilitas yang pendukungnya guna menarik berbagai macam perkembangan. Harus diakui bahwa fasilitas dan daya tarik dari berbagai sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara belum seluruhnya dalam kondisi baik, terutama akses jalan menuju ke berbagai sektor pariwisata yang ada, sebagian besar dalam kondisi yang kurang baik. Selain itu perbaikan sarana dan prasarana disetiap sektor pariwisata belum merata. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah masih berfokus pada sektor pariwisata yang diunggulkan saja.

Dengan peningkatan sektor pariwisata ini tentu akan memiliki dampak yang positif juga terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran. Kabupaten Toraja Utara memiliki kondisi geografis alam yang indah, seperti gunung-gunung yang menjulang, negeri diatas awan yang menjadi andalan sekarang, dan lain sebagainya. Selain itu, tata lingkungan yang alami juga terdapat di kota ini seperti sumber mata air tanah dan tentu adat budaya yang masih dijunjung tinggi di Kabupaten ini. Dengan keindahan alam dan juga ditunjang dengan udara yang sejuk menjadikan Kabupaten Toraja Utara sebagai jujukan wisata dari para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun manca negara. Kondisi ini membawa daya tarik para pengusaha untuk membuka usahanya dalam bidang hotel dan restoran yang terdapat di Toraja Utara. Pertumbuhan hotel dan restoran dalam hal jumlah itu akan membantu pemerintah daerah wisata ini untuk melakukan kegiatan pembangunan. Sebab dengan peningkatan itu pasti dengan otomatis akan memperbanyak pendapatan pajak daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan potensi wisata di Kabupaten Toraja Utara juga dipandang perlu untuk dilakukan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sekaligus diyakini akan mampu membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Toraja Utara.

Potensi wisata diatas tentu jika dikelola dengan baik jelas akan memberi kontribusi besar bagi PAD Kabupaten Toraja Utara, namun dari beberapa jumlah potensi wisata tersebut permasalahan yang muncul adalah masih banyaknya lokasi

wisata yang belum didukung dengan berbagai fasilitas publik dan fasilitas-fasilitas hiburan lainnya.

Pendapatan dari sektor pariwisata diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara, sehingga dalam penelitian ini juga dapat ditemukan strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan perkembangan sektor pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan sektor pariwisata serta meratakan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang diberi judul **Analisis Pengembangan Sektor Parawisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi dan kontribusi sektor pariwisata melalui pajak hotel dan restaurant terhadap PAD?
2. Apakah yang menjadi factor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sektor pengembangan sector pariwisata di Kabupetan Toraja Utara?
3. Bagaimana rumusan strategi pengembangan sector pariwisata di Kabupaten Toraja Utara.
4. Bagaimana rumusan Strategi prioritas pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara.



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian sebelumnya maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besaran potensi dan kontribusi sektor pariwisata melalui pajak hotel dan restoran terhadap PAD di Kabupaten Toraja Utara.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sektor pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara.
3. Untuk menganalisis dan merumuskan strategi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara .
4. Untuk menganalisis dan merumuskan strategi prioritas pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Toraja Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademis atau pihak – pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai retribusi sektor pariwisata.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan penjelasan bagaimana pengelolaan pajak sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Toraja Utara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Penerimaan Pemerintah**

Pelaksanaan kegiatan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa memerlukan dana pembiayaan yang sangat besar dan berlangsung secara bertahap. Dalam hal ini pemerintah berupaya menghimpun sumber-sumber penerimaan Negara yaitu salah satunya penerimaan Negara dari sektor Pajak.

Pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Yang dimaksud dengan pendapatan negara atau penerimaan uang negara atau penerimaan pemerintah yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, dll. 1 Dalam hal ini pendapatan negara yaitu berasal dari pajak maupun non pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sumber-sumber pendapatan negara secara umum dibagi menjadi dua sumber yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non pajak.

##### **a. Pendapatan Pajak**

Pendapatan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang tanpa balas jasa secara langsung. Pendapatan negara berasal dari pajak. Secara garis besar berbagai jenis pajak yang dipungut

pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Sedangkan, Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Diantara jenis pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor dan pajak penjualan. Pendapatan pajak berasal dari pajak pusat dan pajak daerah :

- 1) Pajak Pusat (wewenang pemajakan berada di tangan pemerintah pusat)
  - a. Pajak Penghasilan (pph)
  - b. Pajak Pertambahan Nilai (ppn)
  - c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (ppnbm)
  - d. Pajak Bumi dan Bangunan (pbb)
  - e. Bea Materai
  - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (bphtb)
  - g. Bea Masuk
  - h. Cukai Tembakau dan Ethil Alkohol.
- 2) Pajak Daerah (wewenang pemajakannya berada di tangan pemerintah daerah)
  - a. Pajak Daerah Provinsi
    - (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air;
    - (2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
    - (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air,

- (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

- (1) Pajak Hotel dan Restaurant (PHR)
- (2) Pajak Restoran
- (3) Pajak Hiburan
- (4) Pajak Reklame
- (5) Pajak Penerangan Jalan
- (6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- (7) Pajak Parkir.

B. Pendapatan Non Pajak

Pendapatan non pajak adalah pendapatan negara selain dari pajak. Pendapatan non pajak berasal dari:

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, (antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, sisa anggaran rutin)
2. Penerimaan dari pemanfaatansumber daya alam (segala kekayaan alam yang terdapat diatas, permukaandan di dalam bumi yang dikuasai negara, antara lain royalti di bidang pertambangan)
3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (antara lain dividen atau bagian laba pemerintah dari BUMN, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah dalam BUMN)

4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah (antara lain pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan)
5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi (antara lain lelang barang rampasan negara dan denda)
6. Penerimaan yang berupa hibah yang merupakan hak pemerintah (adalah penerimaan negara berupa bantuanhibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun pemerintah yang menjadi hak pemerintah, kecuali hibah dalam bentuk natura yang secara langsung untuk mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah penyakit yang tidak dicatat dalam APBN)
7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

### **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah**

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi

yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun pendapatan asli daerah tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana di katakan oleh Santoso (1995) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintahan daerah. Pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1). Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan peundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek

pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2). Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 128 ayat (2)

Kaho (2010) menyatakan bahwa untuk menjalankan fungsi pemerintahan, faktor keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada suatu kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Untuk menyelenggarakan semua urusan yang diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut urusan otonomi ataupun kewenangan *medebewind*, daerah tentu memerlukan sumber daya keuangan. Sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah di negara lain, pemberian kewenangan harus juga disertai dengan penyerahan sumber dana keuangan, baik berupa sumber daya yang dimobilisasi dari daerah itu sendiri maupun berupa subsidi dari pemerintah daerah yang menjalankan sejumlah kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab

pemerintah (Syaukani dkk, 2003).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Pada era otonomi daerah sekarang ini, kecenderungan meningkatkan PAD dengan melakukan ekstensifikasi pajak sangat sering dilakukan oleh pemerintah daerah. Kecenderungan ini berbahaya karena akan lebih membebani rakyat.

Langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menghitung potensi penerimaan pajak daerah yang riil yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga bisa diketahui peningkatan kapasitas pajak (*tax capacity*) daerah (Hendrik Worumi, 2018). Sebagai salah satu sumber PAD, retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah dimungkinkan untuk dipungut dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Hasil retribusi daerah berupa pungutan uang sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah, baik yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan pemerintah daerah dan berdasarkan peraturan daerah.



### 2.1.3 Pariwisata

Pariwisata merupakan konsep yang sangat multidimensional. Tak bisa dihindari bahwa beberapa pengertian pariwisata dipakai oleh para praktisi dengan tujuan dan perspektif yang berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Definisi pariwisata memang tidak dapat sama persis diantara para ahli. Berikut adalah beberapa pengertian pariwisata.

Organisasi pariwisata didunia, UNWTO mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas perjalanan dan tinggal seseorang diluar tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak lebih dari selama satu tahun berurutan untuk berwisata, bisnis, atau tujuan lain dengan tidak untuk bekerja ditempat yang dikunjungi tersebut. Menurut Hunziker dan Krapf, pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing disuatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal disitu untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.

Sebagai dasar untuk mengkaji dan memahami berbagai istilah kepariwisataan, berpedoman pada Bab 1 pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menjelaskan sebagai berikut:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha.
- e. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- f. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan pariwisata.
- g. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan penyelenggaraan pariwisata.
- h. Kawasan strategi pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pariwisata adalah suatu bidang industri yang dapat menarik seseorang untuk berkunjung ke suatu daerah wisata yang menjadi sasaran wisata karena adanya daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang pariwisata tersebut, serta keseluruhan

fenomena alam dan buatan manusia dimanfaatkan untuk kepentingan wisatawan, yaitu memenuhi kebutuhan wisatawan selama melakukan perjalanan wisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial untuk terus dikembangkan dalam rangka penguatan perekonomian daerah. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan daerah wisata dengan kata lain pengembangan yang dilakukan tidak bisa hanya sembarangan saja, harus ada target dan tujuan yang dicapai, sehingga apa yang diharapkan dari pengembangan daerah tujuan wisata tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan.

Suwena dan Widyatmaja (2017) mengatakan kepariwisataan tidak menggejala sebagai bentuk tunggal. Istilah umum sifatnya yang menggambarkan beberapa jenis perjalanan dan penginapan sesuai dengan motivasi yang mendasari kegiatan. Orang melakukan perjalanan untuk memperoleh berbagai tujuan dan memuaskan bermacam-macam keinginan. Disamping itu dalam mengembangkan pariwisata itu sendiri, perlu dibedakan antara pariwisata jenis lainnya agar jenis atau macam-macam pariwisata lainnya dapat dikembangkan sesuai harapan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar daerah tujuan wisata tersebut benar-benar menjadi daerah wisata yang baik yaitu:

1. Daerah tersebut memiliki daya tarik yang lain atau berciri khas, baik itu obyek wisatanya ataupun atraksi yang ditampilkan.
2. Adanya fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti permainan rekreasi yang dapat membuat wisatawan lebih betah.
3. Tersedianya tempat berbelanja baik itu cendramata, tempat jual makanan khas dan lain sebagainya.

4. Terdapat fasilitas-fasilitas umum yang viral seperti toilet, tempat parkir, tempat makan dan sebagainya sehingga mempermudah pengunjung, bukan itu saja tetapi bisa juga dilengkapi dengan ATM dan jalan yang memadai untuk pengunjung.

#### **2.1.4 Pengembangan Sektor Pariwisata**

Strategi pengembangan pariwisata adalah langkah-langkah atau rencana yang dilakukan untuk menggali dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada disuatu kawasan, cara yang dilakukan dapat berupa melakukan perbaikan terhadap infrastruktur yang ada baik itu secara fisik maupun nonfisik, sehingga semua itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada disekitar daerah tujuan wisata.

A.Yoeti (2016) menyatakan bahwa dalam perencanaan strategis suatu daerah tujuan wisata dilakukan analisis lingkungan dan analisis sumber daya, tujuan analisis ini tidak lain adalah untuk mengetahui kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) organisasi atau lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengembangan pariwisata didaerah tujuan wisata tersebut.

Adapun hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan daerah wisata, dengan kata lain pengembangan yang dilakukan tidak bisa hanya sembarangan saja harus ada target dan tujuan yang dicapai, sehingga apa yang diharapkan dari pengembangan daerah tujuan wisata tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar daerah tujuan wisata tersebut benar-benar menjadi daerah wisata yang baik yaitu :

1. Daerah tersebut memiliki daya tarik yang lain atau berciri khas, baik itu

obyek wisatanya ataupun atraksi yang ditampilkan.

2. Adanya fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti permainan rekreasi yang dapat membuat wisatawan lebih betah.
3. Tersedianya tempat berbelanja baik itu cendramata, tempat jual makanan khas dan lain sebagainya.
4. Terdapat fasilitas-fasilitas umum yang vital seperti toilet, tempat parkir, tempat makan dan sebagainya sehingga mempermudah pengunjung, bukan itu saja tetapi bisa juga dilengkapi dengan ATM dan jalan yang memadai untuk pengunjung.

Menurut A. Yoeti (2016), ada tiga faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan kepariwisataan yaitu tersedianya obyek dan daya tarik wisata, kemudian adanya fasilitas accessibility yaitu sarana dan prasarana sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisatanya, terjadinya fasilitas admintivities yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam proses pengembangan daerah wisata ada komponen-komponen yang harus bersinergi dengan baik, dengan kata lain bahwa ada pihak-pihak yang harus terus bekerjasama yakni pemerintah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan serta pihak swasta sebagai investor, dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat sendiri sebagai ujung tombak dalam pengembangan pariwisata.

### **2.1.5 Dampak Pengembangan Pariwisata**

Menurut Suwena dan Widyatmaja (2017) Dampak pariwisata dinilai bersifat negatif apabila menimbulkan perubahan – perubahan yang tidak diinginkan atau merugikan eksistensi kebudayaan masyarakat setempat. Sebaliknya dampak pariwisata dinilai positif apabila mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat, revitalisasi dan konservasi bagi eksistensi kebudayaan masyarakat setempat, serta pelestarian lingkungan.

Suwena dan Widyatmaja (2017) Pariwisata memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk memperoleh berbagai manfaat dengan cara menawarkan barang atau jasa yang lazim pula disebut produk wisata. Produk wisata tersebut terdiri tiga jenis yaitu :

- Daya tarik daerah tujuan wisata, termasuk pula citra yang dibayangkan oleh wisatawan;
- Fasilitas di daerah tujuan wisata yang mencakup akomodasi, usaha pengolahan makanan, hiburan, dan rekreasi; dan Kemudahan – kemudahan mencapai daerah tujuan wisata.

### **2.1.6 Pengelolaan Retribusi Pariwisata**

Pengelolaan Retribusi pariwisata adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan pada tempat wisata yang ditentukan oleh perda dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi pariwisata sebagaimana halnya masuk dalam pajak daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangun daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Menurut Karol Teovani Lodan (2022) proses ini merupakan serangkaian tindakan yang terdiri atas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), *actuating* (mengerakkan), dan pengendalian (*controlling*). Untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara harus menjalankan empat fungsi di atas secara seimbang, hal ini dikarenakan keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan berhubungan antara satu dengan yang lain. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka fungsi pengelolaan retribusi sektor pariwisata adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan (*planning*)

Untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dan kondisi di waktu sekarang. Penyusunan rencana kerja dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pariwisata seperti perencanaan penentuan target, fasilitas pada tempat wisata, dan lain-lain.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan aspek yang mendukung pelaksanaan rencana, karena tujuannya adalah mengelompokkan, mengatur, membagi tugas pekerjaan sesuai bidangnya masing – masing. Contohnya seperti seksi pengembangan pariwisata.

### 3) Menggerakkan (*acctualing*)

Adalah proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan anggota kelompok itu. Para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan tetapi juga dapat memengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Seperti pimpinan pada Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata mengarahkan bawahannya untuk melaksanakan suatu tugas, maka pimpinan tersebut juga dapat memengaruhi bawahan dalam menentukan cara bagaimana tugas itu dilaksanakan.

### 4) Pengendalian (*controlling*)

Pengendalian adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk suatu pengelolaan yang baik, jika tidak disertai pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang telah diatur sebelumnya. Pengawasan yang dilakukan seperti pengawasan yang bersifat membimbing.

Lebih lanjut Henry Fayol dalam bukunya yang berjudul *General and Industrial Management* membahas fungsi administrasi dan manajemen. Henry Fayol mengatakan bahwa fungsi administrasi dan manajemen itu ialah:

#### 1) Perencanaan (*planning*),

Perencanaan tujuan perusahaan atau organisasi dan bagaimana usaha untuk mencapai tujuan tersebut dengan sumber daya yang ada. Perencanaan terbagi menjadi dua yaitu perencanaan strategi dan perencanaan operasional.

#### 2) Pengorganisasian (*organizing*),

Pengorganisasian atau sinkronisasi sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya modal, dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan perusahaan.



3) Pemberian komando (*commanding*),  
Fungsi pemberian komando sama dengan mengarahkan (*actuating*).

Commanding dilaksanakan dengan memberikan arahan kepada karyawan atau bawahan untuk menyelesaikan tugas bawahan masing-masing. Selain itu, commanding dilakukan agar tugas dapat dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4) Pengkoordinasian (*coordinating*),

Pengkoordinasian adalah salah satu fungsi manajemen dalam melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi percekocokan, kekacauan, dan kekosongan kegiatan, dengan cara menghubungkan, menyatukan dan menyesuaikan pekerjaan sehingga terjadi kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

5) Pengawasan (*controlling*).

Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk membuktikan, memastikan, dan memantau semua kegiatan yang telah diorganisasikan, direncanakan, dikondisikan, dan diperintahkan sebelumnya dapat berjalan sesuai keinginan atau tujuan organisasi.

Ditinjau dari segi filsafat administrasi dan manajemen- khususnya ditinjau dari segi fungsi penggerakan bawahan, fungsi terpenting yaitu fungsi commanding.

## 2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian Ardian (2017) yang meneliti tentang Analisis Strategi Retribusi Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Gowa, dimana hasil penelitian ini Strategi yang tepat yang digunakan adalah strategi intensif (penetrasi pasar dan pengembangan produk). Hasil analisis matriks SWOT didapatkan empat alternatif strategi, yaitu : (1) Penambahan sumber penerimaan retribusi baik berupa penambahan objek pariwisata maupun objek pendukung kegiatan pariwisata, (2) Alokasi Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, (3) Optimalisasi kegiatan pemasaran, dan (4) Peningkatan Kesadaran wajib retribusi. Berdasarkan analisis QSPM, alternatif strategi yang tepat dan dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gowa adalah memperluas jenis penerimaan retribusi.

Reni Novianti (2017) yang meneliti tentang Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Sektor Pariwisata (Studi Kasus Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Wonosobo) *Strategies in Increasing the Regional Revenue through Retribution Fund from the Tourism Sector (Case Study of Dieng Plateau Area of Wonosobo District)*, hasil penelitian menunjukkan Terdapat lima strategi yang berperan dalam peningkatan retribusi objek wisata dataran tinggi dieng yaitu: 1) Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya wisata yang memiliki daya tarik; 2) Membangun sistem yang terintegrasi; 3) membangun dan memperbaiki sarana dan fasilitas umum; 4) memperbaiki akses menuju objek wisata; dan 5)

merumuskan peraturan yang mengatur tentang pariwisata, pengelolaan objek wisata beserta elemen-elemennya.

Ferry Pleanggra (2012) yang meneliti tentang Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Jumlah Obyek Pariwisata (JO) signifikan berpengaruh positif secara statistik terhadap pendapatan objek pariwisata. Hal ini berarti setiap penambahan obyek pariwisata maka akan meningkatkan pendapatan obyek pariwisata dan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan obyek pariwisata. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu Juliafitri Dj. Gafur yang menyebutkan bahwa banyaknya jumlah obyek pariwisata yang ada, maka dapat meningkatkan pendapatan retribusi obyek pariwisata. Jumlah obyek pariwisata berpengaruh signifikan terhadap pendapatan obyek pariwisata pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alyani (2020) mendapatkan hasil bahwa jumlah obyek pariwisata berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Hasil regresi tersebut bisa diperkuat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Roerkaerts dan Savat Spillane (1987) juga menjelaskan bahwa manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah menambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Penambahan ini dilihat dari meningkatnya pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, seperti penginapan, restoran, dan rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan dan penyediaan cinderamata. Bagi daerah itu sendiri kegiatan usaha tersebut merupakan potensi dalam menggali PAD.

Rindo Bagus Sanjaya (2018) Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Desa Kemetul, Kabupaten Semarang. Hasil dari tersebut menyimpulkan bahwa Desa Kemetul memiliki banyak potensi wisata untuk dijadikan daya tarik wisata. Desa Kemetul perlu mempertimbangkan penguatan produk unggulan, strategi pengembangan objek wisata berkelanjutan, dan strategi pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia.

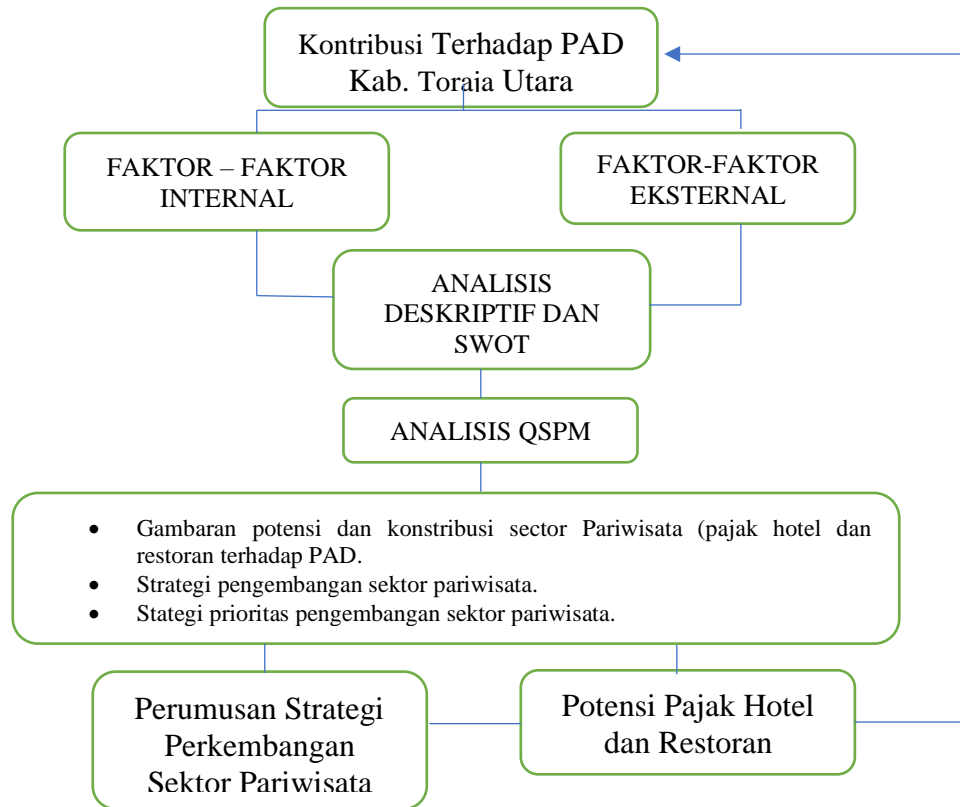
Herwin Mopangga (2019) yang meneliti tentang strategi pengembangan Pariwisata untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. Penelitian menyimpulkan bahwa PAD sektor pariwisata relatif kecil kontribusinya terhadap total PAD Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo. Rendahnya PAD relevan dengan rendahnya tingkat hunian kamar (TPK) hotel dan rata-rata lama inap (LoS). Minimnya pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga relevan dengan minimnya kegiatan penunjang daya tarik objek wisata seperti atraksi seni budaya serta produk lokal yang bisa menjadi souvenir bagi wisatawan. Sarana prasarana di objek wisata unggulan relatif tidak lengkap atau tidak memenuhi standar kepariwisataan. Rendahnya PAD, TPK & LoS juga bisa menjelaskan bahwa meningkatnya wisatawan ke Gorontalo hanya sebagai transit menuju objek wisata unggulan diluar Provinsi Gorontalo.

Penelitian yang dilakukan Mardianis (2018) menunjukkan bahwa sektor pariwisata belum menjadi sektor unggulan, akan tetapi merupakan sektor yang prospektif untuk dikembangkan dalam mendukung pembangunan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kerinci ke depannya. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada periode penelitian hanya 0,57 persen atau

relatif tidak berperan. Adapun strategi pengembangan ke depannya difokuskan pada peningkatan keunikan Kabupaten Kerinci sebagai destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata berbasis partisipasi masyarakat, pembinaan masyarakat yang sadar wisata, diversifikasi produk wisata yang bisa menjadi ciri khas daerah dibanding daerah lainnya, menumbuhkan gerakan sadar wisata “tradisi mudik/pulang kampung”, melestarikan budaya lokal sebagai keunikan wisata dan peningkatan promosi dan publikasi.

### **2.3 Kerangka Pikir**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Toraja Utara untuk mengetahui pengelolaan potensi penerimaan pajak hotel dan restoran yang dapat memengaruhi sektor pariwisata. Kontribusi dari sektor pariwisata Pemerintah Kabupaten Toraja Utara terhadap penerimaan pendapatan asli daerah diharapkan akan terus meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan pendapatan asli daerah maka akan menunjukkan kualitas Otonomi Daerah tersebut akan meningkat. Retribusi sektor pariwisata diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara sehingga dapat membantu meningkatkan dan meratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toraja Utara.



**Gambar 1. Alur Kerangka Pikir Penelitian**

Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Dengan demikian perencana strategis (strategic planner) harus menganalisa faktor-faktor strategis dalam kondisi yang ada saat ini. Strategi sebagai sebuah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu, dan memiliki sifat multidimensi (Environmental, Economic, Social-Cultural, dan Political). Strategi sangat berperan penting dalam suatu kegiatan karena dalam strategi terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan,

dan memiliki teknik untuk mencapai tujuan secara efektif. Suatu kegiatan dengan perencanaan yang sangat baik pun akan mendapatkan hasil yang buruk apabila tanpa disertai dengan strategi dalam pelaksanaannya. Sehingga strategi yang merupakan suatu pendekatan untuk mengatasi suatu permasalahan atau untuk melakukan suatu kegiatan, dalam hal ini adalah permasalahan infrastruktur sumber daya air, memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, serta daftar pustaka yang telah terkumpul sebelumnya, maka hipotesis penelitian Strategi Peningkatan Retribusi Sektor Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara adalah penanganan infrastruktur, Pemanfaatan Teknologi, Meningkatkan Minat Investor dan Memaksimalkan Potensi-potensi wisata guna untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata.